

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesehatan dan Keselamatan kerja atau K3 merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Kesehatan dan Keselamatan kerja berdampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerja (Irzal, 2016). Hal ini berlaku dalam perkembangan industri ataupun jasa konstruksi yang ada. Saat ini dapat ditemui banyaknya proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, tentunya dengan berbagai teknologi dan inovasi-inovasi yang ditawarkan (Wowor *et al.*, 2013).

Dalam memilih kontraktor yang akan bekerja dilingkungan organisasi, diperlukan kehati-hatian karena kelalaian kontraktor yang berakibat kecelakaan akan menimbulkan kerugian dan merusak kinerja K3 Organisasi (Ramli, 2010). Menurut data *International Labor Organization* (ILO) pada tahun 2016, terdapat 1 pekerja tewas setiap 15 menit akibat kecelakaan kerja dan PAK, dan setiap 15 detik 153 pekerja mengalami kecelakaan. Diperkirakan 2,3 juta pekerja tewas setiap tahun akibat kecelakaan kerja dan PAK. Lebih dari 160 juta pekerja menderita penyakit akibat kerja dan terdapat lebih dari 313 juta kecelakaan tidak fatal setiap tahunnya (ILO, 2016).

Data BPJS Ketenagakerjaan telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus di Indonesia hingga akhir 2015. Sementara itu, untuk kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja. Total jumlah kecelakaan kerja setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga 5%. Namun untuk kecelakaan kerja berat tren peningkatannya lebih besar yakni sekitar 5%-10% setiap tahunnya (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, 2016).

Pekerja kontraktor sangat rawan terhadap kecelakaan. Tenaga kontraktor khususnya untuk pekerja kasar merupakan tenaga kerja kurang terdidik dibanding

dengan tenaga kerja perusahaan, karena hal tersebut pengetahuan mengenai K3 relatif lebih rendah dibanding pekerja perusahaan. Tenaga kontraktor umumnya juga berada atau bersinggungan langsung dengan pekerjaan, merekalah yang sejatinya paling terkena pajanan bahaya ditempat kerja (Ramli, 2010).

Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi secara umum 80-85% disebabkan karena faktor manusia, yaitu *unsafe action*. *Unsafe action*, yaitu tindakan yang salah dalam bekerja dan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan (*human error*), biasanya terjadi karena ketidakseimbangan fisik tenaga kerja dan kurangnya pendidikan. Adapun yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang tidak baik ataupun kondisi peralatan kerja yang berbahaya (*unsafe condition*), biasanya dipengaruhi oleh hal-hal seperti alat-alat yang tidak layak pakai, alat pengaman yang kurang memenuhi standar. Kedua hal tersebut menjelaskan bahwa perilaku manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan ditempat kerja (Irzal, 2016).

Kesehatan dan Keselamatan kerja bukan semata sebagai kewajiban, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap para pekerja dan bagi setiap bentuk kegiatan pekerja. Perusahaan perlu melaksanakan program K3 yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja agar para karyawan dapat mengerti tentang prosedur dalam melakukan pekerjaan (Irzal, 2016). Permenaker 05/MEN/1996 mempersyaratkan adanya pengurus atau wakil pekerja yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk menyikapinya, perusahaan dapat membentuk unit atau departemen baru yang bertanggung jawab khusus terhadap K3 (Kemenaker RI, 1996).

Penelitian yang dilakukan Dumbela dkk., (2012) di PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo AP2B Sistem Minahasa membuat perencanaan, pematauan, pelaporan berdasarkan SMK3 karena SMK3 merupakan salah satu indikator kinerja. Sistem pelaporan berjalan dengan baik karena diadakan monitor rutin, sehingga dapat dimonitor apa saja yang harus diperbaiki. Penelitian yang dilakukan Afief dkk., (2016) mengenai peran petugas K3 dalam mendorong partisipasi pekerja didapatkan hasil bahwa berdiskusi maupun mengajak para

pekerja kontrak untuk meminta masukan atau informasi mengenai manajemen risiko dalam perencanaan adalah hal yang penting sehingga memberikan ruang bagi pekerja kontrak untuk berpartisipasi memberikan masukan dan pekerja kontrak merupakan pihak yang secara langsung terkena dampak keputusan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.

PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kelistrikan yang berkontribusi aktif dalam pencapaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Salah satu kontribusinya diwujudkan melalui pembangunan Gas Insulated *Switchgear* (GIS) yang merupakan proyek besar dan diawasi oleh Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat (UPP JJBB 2) (Suprateka, 2018).

OHSAS 18001 mensyaratkan organisasi agar mengelola kontraktor dengan baik, mulai dari pemilihan, pelaksanaan sampai pemantauan diakhir pekerjaannya. Salah satu upaya adalah mengembangkan dan menjalankan sistem atau prosedur untuk mengelola keselamatan kontraktor melalui sistem manajemen keselamatan kontraktor (*Contractors Safety Management System*) (Ramli, 2010). Setiap kontraktor yang bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLN, telah mengikuti prosedur CSMS yang diberlakukan PT PLN (Persero).

Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat (UPP JJBB 2) membentuk unit atau departemen baru yang bertanggung jawab khusus terhadap K3 dan memiliki struktur organisasi pada April 2018. Unit K3 memiliki 2 SDM K3 yang didalam perannya harus mengawasi 22 proyek pembangunan ditempat yang berbeda serta bekerjasama dengan 22 Kontraktor dengan total keseluruhan pekerja sebanyak 500 orang. Unit K3 UPP JJBB 2 memiliki peran untuk mengelola aspek-aspek K3 dalam perusahaan dengan menerapkan suatu sistem manajemen K3 yaitu perencanaan, pengawasan, dan pelaporan untuk mencapai hasil yang paling efektif dalam mencegah terjadinya kecelakaan dan efek lain yang dapat merugikan perusahaan.

Survei pendahuluan yang dilakukan di area Pembangunan Gas Insulated *Switchgear* (GIS) Puloagung dan Penggilingan, didapati beberapa masalah,

diantaranya penggunaan APD yang tidak lengkap seperti 1 pekerja yang tidak menggunakan *Bodyharness* ketika bekerja diatas ketinggian, terlihat 2 pekerja yang menggunakan helm tidak benar atau terbalik, tidak menggunakan sarung tangan saat pengelasan, terlihat 2 pekerja yang merokok diarea lingkungan kerja. Kurangnya *safety sign* seperti tidak terpasangnya rambu-rambu bahaya, peringatan, petunjuk arah, tidak adanya *safety line* pada tangga, tidak ada penutup pada lobang atau tanda *safety line* disekitar lobang sehingga memiliki risiko yang besar untuk pekerja atau pengunjung terperosok, material yang berantakan. Padahal, sebelum dimulainya pembangunan GIS, pihak HSE kontraktor memiliki peran untuk membuat *working permit* dan *job safety analysis* (JSA) yang diberikan kepada Unit K3 UPP. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan tersebut harusnya dapat diminimalisir dengan adanya Unit K3 yang mengimplementasikan K3 didalamnya.

Berdasarkan observasi penelitian awal dan permasalahan yang muncul di lapangan, maka penulis mencoba untuk menganalisis peran unit K3 dalam implementasi K3 pada proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLN yang bekerjasama dengan kontraktor. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang “Analisis Peran Unit K3 Dalam Implementasi K3 Di Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat (UPP JJBB 2) Tahun 2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut permasalahan yang terjadi adalah perilaku tidak aman dari pekerja dan kondisi tidak aman pada proyek pembangunan GIS Pulogadung dan Penggilingan diantaranya adalah penggunaan APD yang tidak lengkap dan benar, merokok diarea kerja, kurangnya *safety sign* dan *housekeeping* yang tidak baik, padahal sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor harus terlebih dahulu membuat *working permit* dan *job safety analysis* (JSA), namun tidak diterapkan. PLN UPP JJBB 2 memiliki Unit K3 dengan 2 SDM K3 yang harus mengawasi 22 Proyek ditempat yang berbeda-beda dengan jumlah

pekerja sebanyak 500 orang. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLN harusnya dapat diminimalisir dengan adanya unit K3 yang mengimplementasikan K3 didalamnya. Dengan permasalahan tersebut penulis bermaksud menganalisis peran Unit K3 dalam Implementasi K3 di Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat (UPP JJBB 2) Tahun 2018.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana analisis peran Unit K3 dalam Implementasi K3 di Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat (UPP JJBB 2) Tahun 2018?
2. Bagaimana peran Unit K3 dalam Perencanaan K3 di Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat (UPP JJBB 2) Tahun 2018?
3. Bagaimana peran Unit K3 dalam Pengawasan K3 di Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat (UPP JJBB 2) Tahun 2018?
4. Bagaimana peran Unit K3 dalam Pelaporan K3 di Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat (UPP JJBB 2) Tahun 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Menganalisis peran Unit K3 dalam Implementasi K3 di Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat (UPP JJBB 2) Tahun 2018.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui peran Unit K3 dalam Perencanaan K3 di Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat (UPP JJBB 2) Tahun 2018.
2. Mengetahui peran Unit K3 dalam Pengawasan K3 di Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat (UPP JJBB 2) Tahun 2018.
3. Mengetahui peran Unit K3 dalam Pelaporan K3 di Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat (UPP JJBB 2) Tahun 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Perusahaan

1. Sebagai bahan evaluasi terhadap peran unit K3 dalam implementasi K3
2. Sebagai bahan masukan atau informasi mengenai peran Unit K3 dalam implementasi K3

1.5.2 Bagi Institusi Pendidikan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan bagi civitas akademika Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul, khususnya mengenai analisis peran Unit K3 dalam Implementasi K3 Tahun 2018.

1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya demi perkembangan ilmu analisis peran Unit K3 dalam implementasi K3.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit K3 dalam Implementasi K3 Tahun 2018 di UPP JJBB 2. Penelitian ini akan dilakukan di Unit K3 UPP JJBB 2 dimulai dari bulan September sampai Desember 2018. Penelitian ini melibatkan HSE yang memiliki peran perencanaan, pengawasan, dan pelaporan dalam implementasi K3, karena ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yaitu perilaku tidak aman dari pekerja dan kondisi tidak aman pada proyek pembangunan GIS yang harusnya dapat diminimalisir dengan adanya Unit K3. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu pertanyaan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.